

ABSTRAK

Perkembangan perbankan memberikan manfaat sekaligus berpotensi menimbulkan sengketa, termasuk pemblokiran rekening secara sepihak. Tindakan ini harus sesuai dengan prinsip perlindungan hukum yang menjamin hak nasabah. Kasus Putusan No. 112/Pdt.G/2022/PN Yyk antara PT. Dunia Trans Persada dan Bank Mandiri KCP Yogyakarta menyoroti pemblokiran rekening meskipun putusan sebelumnya (No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl) telah menetapkan kepemilikan sah dana yang disengketakan. Bank tetap melakukan pemblokiran, sehingga Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum bagi nasabah yang rekeningnya diblokir secara sepihak serta membuktikan bahwa tindakan Bank Mandiri KCP Yogyakarta merupakan perbuatan melawan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, berdasarkan studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Pemblokiran rekening oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta dalam Putusan No. 112/Pdt.G/2022/PN Yyk dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau litigasi. Non-litigasi mencakup mediasi, negosiasi, arbitrase, dan pengaduan ke OJK, sedangkan litigasi melalui pengadilan menghasilkan putusan mengikat. Jika non-litigasi gagal, nasabah dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. 2) Kasus pemblokiran rekening PT Dunia Trans Persada tanpa dasar hukum atau perintah pengadilan sah merupakan perbuatan melawan hukum, melanggar prinsip legalitas dan hak kepemilikan. Dengan terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUH Perdata, nasabah dapat menuntut pembukaan kembali rekening serta ganti rugi melalui jalur hukum.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pemblokiran Rekening, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The development of banking provides both benefits and potential disputes, including unilateral account blocking. This action must be in accordance with the principle of legal protection that guarantees customer rights. The case of Decision No. 112/Pdt.G/2022/PN Yyk between PT Dunia Trans Persada and Bank Mandiri KCP Yogyakarta highlights the blocking of accounts even though the previous decision (No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl) has determined the legal ownership of the disputed funds. The bank continued to block the account, so the Plaintiff filed a lawsuit based on Article 1365 of the Civil Code. This research aims to analyze the legal remedies for customers whose accounts are unilaterally blocked and prove that the actions of Bank Mandiri KCP Yogyakarta are unlawful. The approach used is normative juridical with analytical descriptive specifications, based on literature study of court decisions, laws and regulations, and related literature. The results of the research in this paper show that: 1) Account blocking by Bank Mandiri KCP Yogyakarta in Decision No. 112/Pdt.G/2022/PN Yyk can be resolved through non-litigation or litigation. Non-litigation includes mediation, negotiation, arbitration, and complaints to OJK, while litigation through the courts results in a binding judgment. If non-litigation fails, customers can file a lawsuit under Article 1365 of the Civil Code. 2) The case of PT Dunia Trans Persada's account being blocked without basis.

Keywords: *Acts Against The Law, Account Blocking, Legal Protection*